

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah melahirkan berbagai implikasi yaitu perubahan sosial serta fasilitas yang cukup signifikan melahirkan kesempatan nyata bagi daerah untuk bangkit mengembangkan potensi daerah, membangun daerahnya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional. Menyikapi kondisi tersebut yang didasari pemahaman kebhinnekaan suku, agama dan budaya yang tersebar keseluruh pelosok nusantara, setiap daerah mempunyai budaya yang berbeda-beda yang mencirikan daerahnya masing-masing. Kebudayaan merupakan suatu identitas bangsa, ciri khas suatu bangsa, karakter bangsa ataupun sebagai tanda negara tersebut mempunyai sejarah perjalanan hidup dari awal sebuah negara itu bisa terbentuk. Kebudayaan merupakan sebuah simbol kebanggaan bagi suatu masyarakat tertentu bahkan menjadi penentu dari maju tidaknya suatu negara. Melestarikan kebudayaan erat kaitannya dengan apa yang telah dicita t citakan oleh kemerdekaan bangsa ini yaitu cita-cita bangsa “mencerdaskan kehidupan bangsa” bukanlah makna yang berdasarkan pada konsep iptek atau konsep biologi genetika, melainkan suatu konsepsi kebudayaan. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan upaya untuk meningkatkan kadar kebudayaan bangsa, sebagai suatu proses humanisasi untuk mengangkat harkat dan derajat insan dari bangsa kita. Salah satu bagian dari kebudayaan adalah Kesenian. Kesenian memiliki bobot besar dalam kebudayaan. Kemajuan kebudayaan bangsa dan peradabannya

membawa serta, dan secara timbalbalik dibawa serta, oleh kemajuan keseniannya. Kesenian tradisional juga merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi lain. Misalnya, mitos berfungsi menentukan norma untuk perilaku yang teratur serta meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan. Secara umum, kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat. Kesenian daerah (tradisional) pada dasarnya adalah anonim, ia tidak bisa dibatasi atas klaim wilayah. Ia menjadi tak terbatas oleh garis yang pasti, untuk itulah kesenian bisa ditempatkan sebagai sarana menciptakan ketahanan budaya yang harus disikapi sebagai ketahanan nasional. Masyarakat perlu untuk melestarikan kebudayaan khususnya kesenian tradisional yang ada di daerah tempat tinggal. Keberhasilan pelestarian kesenian daerah (tradisional) sangat ditentukan oleh kemampuan aparat dalam merumuskan program atau kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersamat sama melaksanakan program atau kebijakan yang telah diputuskan yang harusnya didukung atau ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang pada hakekatnya merupakan proses bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan. Pembangunan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat dunia kepariwisataan memiliki ruang lingkup yang besar, maka kegiatan pembangunan sektor budaya dan pariwisata

tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, melainkan harus dilakukan bersama-sama dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

Salah satu bentuk lembaga kesenian yang ada adalah sanggar seni. Perkembangan sanggar seni semakin hari semakin tumbuh dan sangat beragam seperti sanggar tari, musik, lukis, perfileman, teater, dan sebagainya. Semua sanggar-sanggar tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu keberhasilan dalam mengembangkan seni yang ada. Sanggar-sanggar seni yang ada diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 21 tahun 2015 tentang Standar Usaha Sanggar Seni.

Peran Pemerintah sangat dibutuhkan oleh lembaga-lembaga Kesenian yang ada di Kota Pontianak. Hal ini sangat di perlukan agar lembaga-lembaga tersebut dapat bertahan dan tidak memiliki banyak halangan atau penghambat dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Peran pemerintah yang diharapkan yaitu Pembinaan yang diberikan kepada setiap lembaga-lembaga kesenian yang ada di Kota Pontianak. Pada dasarnya setiap organisasi pemerintah, akan memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat dengan semaksimal mungkin di samping mempunyai kegiatan sendiri yang harus dilaksanakan dalam rangka akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi publik (pemerintah) diperlukan kedisilinan dan loyalitas dari pegawai yang melaksanakan beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Istilah OD kependekan dari *Organization Development*. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa disalin menjadi “pengembangan

organisasi” atau “pembinaan organisasi”. Keduanya dapat disingkat dengan kata PO. Ada yang mengatakan bahwa pembinaan itu diperuntukkan bagi manusia atau orangnya sedangkan terhadap organisasi lebih baik dipakai pengembangan organisasi. Jika diamati secara seksama *Development* dalam *Organizational Development*, yang di “develop” bukan hanya organisasinya akan tetapi juga termasuk orangnya (sikap, persepsi dan motivasinya). Maka dari itu antara pembinaan dan pengembangan tidak perlu dibedakan.

Manullang (2004:27), menyatakan pembinaan adalah “Segala tindakan atau usaha yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengarahannya, penggunaan serta pengendalian sehingga secara efektif dan efisien”. Pembinaan memiliki makna yang berdekatan dengan kata bimbingan dengan artian yaitu melakukan pengarahannya (mengarahkan), mengembangkan, dan menyempurnakan keahlian seseorang agar menjadi lebih baik sesuai dengan yang diharapkan oleh yang membina. Di bawah ini terdapat beberapa konsep dan teori tentang pembinaan menurut para ahli.

Menurut Wibowo (2007:165) sumber daya manusia dalam setiap organisasi, meskipun telah melalui tahap seleksi yang baik namun dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masih selalu menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikannya sendiri. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan sumber daya manusia.

Thoah (1999:244) mengemukakan pula bahwa ada dua unsur yang terdapat dalam pengertian itu, yakni pembinaan merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan kedua pembinaan menunjukkan perbaikan

atas sesuatu. Permasalahan yang dapat diajukan adalah titik berat dari makna pembinaan itu sendiri yang dapat diartikan sebagai proses atau materi upaya pembinaan.

Pembinaan adalah suatu proses hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu Thoha (1999:243). Pembinaan juga merupakan suatu proses, atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya.

Menurut Beckhard (Thoha, 1997:11-12), Pembinaan Organisasi merupakan suatu usaha (1) yang terencana, (2) meliputi semua aspek organisasi, (3) diatur dari atas, (4) untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui (5) intervensi yang terencana dalam proses organisasi dan mempergunakan pengetahuan ilmu perilaku.

Pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggungjawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuan, sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri kearah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal serta pribadi mandiri.

Menurut Dale S. (Moekijat, 2005:3) pengembangan organisasi (*organization development*) adalah suatu strategi pendidikan yang kompleks yang

direncanakan untuk meningkatkan keaktifan dan kesehatan organisasi melalui campur tangan yang direncanakan oleh konsultan dengan menggunakan teori dan teknik-teknik ilmu perilaku organisasi. Sedangkan menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M.P.A. (Moekijat, 2005:3) pengembangan organisasi, sebagai teori manajemen, berarti serangkaian konsep, alat dan teknik untuk melakukan perencanaan jangka panjang dengan sorotan pada hubungan antara kelompok kerja dan individu dikaitkan dengan perubahan-perubahan yang bersifat struktural.

Pendapat para ahli dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengembangan organisasi merupakan peningkatan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan potensi manusia secara lebih efektif dan mengevaluasi setiap perubahan dan mengarahkannya secara konstruktif. Pembinaan dan pengembangan organisasi dapat berjalan dengan semestinya apabila perilaku didalam suatu organisasi sangat kondusif.

Memperhatikan Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Layanan Pendidikan yang Optimal untuk mencapai Masyarakat Kalimantan Barat yang Cerdas dan Berbudaya” serta melihat Visi UPT Museum secara umum yaitu sebagai Pusat Pelestarian, Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Seni Budaya Daerah Kalimantan Barat.

Adapun struktur organisasi, UPT Museum sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 93 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), merupakan unsur pemimpin yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, mengendalikan kegiatan UPT Museum berdasarkan kebijakan Kepala Dinas dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi administrasi kepegawaian dan umum serta pengelolaan keuangan dan asset. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Unit.
3. Kelompok Jabatan Fungsional, merupakan Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan di bidang tertentu. Para fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit. Jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Saat ini UPT Museum mempunyai 20 Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari:

TABEL 1.1
PEGAWAI NEGERI SIPIL
UPT MUSEUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN JABATAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Eselon IV	2 Orang
2	Staf	28
3	Tenaga Honor	15

Sumber: RENSTRA UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2024

TABEL 1.2
PEGAWAI NEGERI SIPIL
UPT MUSEUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	S2	2
2	S-1	7
3	SMU	21

Sumber: RENSTRA UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2024

Fasilitas berkesenian bagi Sanggar-sanggar Kesenian yang ada di Kota Pontianak pada UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat termasuk dalam klarifikasi B, dengan luas tanah yang diperlukan 3 (tiga) Hektar, sementara luas tanah yang ada hanya 4.500 M2 dan telah dibangun Gedung Teater Tertutup seluas 600 M2 pada tahun 1976/1977. Pada tahun 1982 dibangun Gedung Sekertariat dengan dana APBN, Tahun 2001 Gedung Sekertariat direhab menjadi

2 (dua) lantai dengan dana APBD, tahun 1990 dibangun Gedung Pameran dengan dana APBN, kemudian Gedung Pameran dibongkar pada Tahun 2007, tahun 1995 dibangun Bengkel Musik dan Bengkel Tari dengan dana APBN, setelah Otonomi Daerah pembangunan sarana di Taman Budaya menggunakan dana Aspirasi dan APBD sehingga pada tahun 2010 dapat terbangunlah Panggung Terbuka, Lahan Parkir, Pembuatan Pagar dan Saluran Air.

Tujuan dan pada UPT Museum adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya sumber daya manusia yang berkompeten dan professional di bidang seni budaya.
2. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai budaya dalam karakter dan jati din' bangsa sebagai ketahanan bangsa.
3. Terpenuhinya sarana dan prasarana bidang seni budaya di Kalimantan Barat.
4. Meningkatkan kualitas seni budaya di Kalimantan Barat.
5. Meningkatkan daya kreativitas pelaku seni budaya di Kalimantan Barat.

Dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan pengembangan aparatur.
2. Melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap organisasi kesenian dan para seniman.
3. Mengagendakan pagelaran bersama kelompok-kelompok etnis yang ada di daerah Kalimantan Barat.

4. Meningkatkan wawasan seni terhadap aparaturnya melalui peningkatan akademik dan para pelaku serta penggiat seni melalui pelatihan yang terus menerus dan terukur.
5. Menyusun rencana kerja dan program kerja untuk pengembangan kesenian.

Eksistensi kesenian di Indonesia, diikuti Kalimantan Barat yang memiliki kekhasan unsur kearifan lokal dan budaya dalam mengembangkan kesenian ini khususnya Kota Pontianak. Mendu, Bangsawan, dan Makyong bertengger di teater tradisi sedangkan teater modern cukup berkembang hingga dikalkulasikan sekitaran 20-an Sanggar-Sanggar Kesenian. Sanggar-Sanggar Kesenian ini terbagi pada tingkat sekolah, kampus serta umum di Kota Pontianak. Adapun daftar sanggar-Sanggar-Sanggar Kesenian di Kota Pontianak sebagai berikut:

TABEL 1.3
SANGGAR-SANGGAR KESENIAN DI KOTA PONTIANAK

NO	SANGGAR-SANGGAR KESENIAN	KATEGORI
1	Sanggar Andari	TARI
2	Sanggar Bengkawan	TARI
3	Sanggar Bogenville	TARI
4	Sanggar Neo Tarigas	TARI
5	Sanggar Kijang Berantai	TARI
6	Sanggar Spectrum	TARI
7	Sanggar Warsada	TARI
8	Sanggar Mandala	TARI
9	Sanggar Gendang Gendis	PERTUNJUKAN
10	Komunitas Santri IAIN (KOMSAN)	TEATER
11	Komunitas Seni Jalan Lain (KSJL)	TEATER
12	Teater Lingkaran Keluarga (LINKA)	TEATER
13	Teater Terbit 12	TEATER
14	Teater Retak	TEATER
15	Rumah Teater (RUTER)	TEATER
16	Teater Tradisional Mendu	TEATER

17	Teater Tradisional Bangsawan	TEATER
18	Teater Jaya Abadi Makmur Bersama (JAMBER)	TEATER
19	Barikade Teater (BARET)	TEATER
20	Dapur Teater	TEATER
21	Teater Topeng	TEATER
22	Teater Kemala Bhayangkari (TEMLAK)	TEATER
23	Teater Muhammadiyah 1 (TERMOS)	TEATER
24	Teater Pituah Enggang (PITUNG)	TEATER
25	Teater Dasa	TEATER
26	Forum Masyarakat Teater (FORMAT)	TEATER
27	Teater Cadar	TEATER
28	Teater Abunawas	TEATER
29	Teater Ana Ente	TEATER

Sumber: Hasil Survey Lapangan (Data UPT Museum Tahun 2021)

Berkesenian juga tidak lepas dari kaidah-kaidah manajemen sehingga memerlukan organisasi atau sering akrab disebut Sanggar-Sanggar Kesenian. Sanggar-Sanggar Kesenian secara sederhana dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang melembagakan diri dibidang seni, yang bersifat tradisional maupun modern untuk mempertunjukkan hasil karya seninya secara komersial maupun non-komersial untuk suatu tontonan atau tujuan lain. Kebanyakan orang berkata membuat suatu organisasi lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan ini memang benar adanya, sebab banyak sanggar-Sanggar-Sanggar Kesenian diragukan eksistensinya. Selain harus kuat secara manajemen, teater juga harus kuat secara financial, karena membuat suatu pertunjukan teater itu tidak murah.

Kondisi berkesenian di Kota Pontianak memang dalam proses tumbuh dan berkembang. Terdapat sanggar-Sanggar-Sanggar Kesenian yang bubar karena tidak mampu konsisten. Dilihat tugas dan fungsinya, teater sangat berdampak positif terhadap kemajuan Kota Pontianak itu sendiri, yaitu sebagai media pewarisan budaya, sarana pendidikan, media hiburan masyarakat, aset pendapatan

devisa nasional, fungsi ekonomi masyarakat dan fungsi politik tertentu. Namun pada kenyataannya profesi sebagai Penggiat seni atau Sanggar-Sanggar Kesenian ini belum dapat dikatakan mampu dalam pemecahan atas banyaknya tuntutan kehidupan. Dimana letak sila kedua pada amalan Pancasila yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Sebagaimana diatur dalam keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 93 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2009 UPT Museum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dibidang pelestarian, pembinaan dan pengembangan serta pengolahan seni sebagai unsur budaya daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021, maka tugas pokok dan fungsi UPT Museum Provinsi Kalimantan barat adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan program kerja di lingkungan UPT Museum
2. Merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program, monitoring, evaluasi, aparatur dan umum serta pengelolaan keuangan serta asset di lingkungan UPT Museum
3. Melaksanakan kegiatan lintas seni lintas Kabupaten/Kota serta pelaksanaan ceramah seminar, temu karya, loka karya dan sarasehan seni.
4. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan inventarisir karya seni daerah.
5. Pelaksanaan pengolahan seni serta eksperimentasi karya seni.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, UPT Museum mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
2. Pelaksanaan penggalian, penelitian dan pengembangan, Pameran seni dan budaya.
3. Pelaksanaan pengolahan seni, gladi eksperimentasi karya seni.
4. Pelaksanaan kegiatan seni lintas Kabupaten dan Kota serta pelaksanaan Pameran, ceramah, seminar, diskusi, temu karya, loka karya, dan sarasehan seni.
5. Pelaksanaan urusan dokumentasi, publikasi dan informasi seni.
6. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan inventarisir karya seni daerah.
7. Pengendalian pelaksanaan tugas di UPT Museum.

Berdasarkan obesrvasi penelitian di lapangan dan dari informasi yang diperoleh terdapat beberapa masalah tentang pembinaan UPT Museum terhadap Sanggar-Sanggar Kesenian. Masalah tersebut ialah UPT Museum tidak tepat perencanaan dalam menentukan pembinaan terhadap Sanggar-Sanggar Kesenian. Sehingga terlihat Sanggar-Sanggar Kesenian membina dirinya secara mandiri.

Semua aspek – organisasi UPT Museum belum maksimal dalam membina Sanggar-Sanggar Kesenian. Tingkat profesionalisme pegawai belum berjalan dengan baik. Banyak pegawai tidak mengerti akan kesenian. Sarana prasarana UPT Museum untuk memudahkan Sanggar-Sanggar Kesenian berkreaitivitas belum memadai, seperti sound system tidak ada, kursi gedung tidak layak pakai, lampu pertunjukan tidak lengkap, kondisi gedung hampir rubuh, dll.

Padahal UPT Museum memiliki Program peningkatan sarana dan, prasarana'dengan kegiatan pengadaan perlengkapan/peralatan gedung. Ini yang menjadi problem yang serius karena secara fasilitas di Gedung Pertunjukkan sangat kurang dan kondisinya sudah tidak baik.

Pengaturan/pengelolaan yang dilakukan UPT Museum terhadap penggunaan fasilitas kepada Sanggar-Sanggar Kesenian masih belum jelas. Tidak semua sanggar bisa latihan di Taman Budaya karena tempat latihan tidak dapat menampung. Tidak tetapnya harga setiap penyewaan gedung pertunjukkan kepada Sanggar-Sanggar Kesenian.

Efektivitas dan kesehatan organisasi UPT Museum dapat dikatakan belum tercapai. Sebagai pelaksana teknis dalam pembinaan Sanggar-Sanggar Kesenian, masih ada pegawai – pegawai teknis yang tidak banyak mengerti tentang seni pertunjukan. Ditambah belum adanya pamong budaya pada UPT Museum, pamong budaya ini lah sebenarnya menjadi sarana pembinaan kepada Sanggar-Sanggar Kesenian dalam membentuk suatu karya. Tidak adanya pamong budaya menyebabkan sanggar-sanggar terbina secara mandiri. Intervensi yang terencana dengan mempergunakan ilmu perilaku, UPT Museum dalam proses pembinaan ini tidak ada. Sanggar-Sanggar Kesenian tidak merasa tercampuri dengan kepentingan UPT Museum dalam pembinaan.

Proses pembinaan yang dilakukakan oleh UPT Museum yang tertuang di SOP masih banyak yang belum terlaksana sehingga belum mampu membina Sanggar-Sanggar Kesenian di kota Pontianak untuk menjalankan kaidah-kaidah

berkesenian. Sesungguhnya UPT Museum telah melakukan pembinaan terhadap seniman dan Sanggar-Sanggar Kesenian di Kota Pontianak.

Pernbinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat yang berarti bangun/bangunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan berarti membina, memperbaharui atau proses, perbuatan, cara membina, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna rnencapai suatu tujuan tertentu.

UPT Museum bertanggung jawab untuk membina Sanggar-Sanggar Kesenian di Kota Pontianak. Kenyataannya tak seperti apa yang tercatat di Standar Operasioanal Prosedur. Adanya fenomena yang terjadi dapat penulis rincikan sebagai berikut : 1. Pemerintah kurang memperhatikan semua jenis sanggar terlihat diprogram pembinaan. 2. Kegiatan yang tidak rutin dilaksanakan oleh UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat yang membuat sanggar kehilangan wadah untuk menampilkan hasil karyanya. 3. Kegiatan Pergelaran hanya menampilkan sanggar yang ditunjuk saja sedangkan masih banyak sanggar lain yang ingin menampilkan kreativitas mereka dalam pertunjukan yang diadakan oleh UPT Museum. 4. Tidak adanya bantuan financial baik itu berupa bantuan dana atau perlengkapan yang diperlukan untuk sanggar-sanggar yang membutuhkan. Untuk itulah penulis tertarik menulis dan meneliti dalam proposal skripsi dengan judul **“Tugas Pokok dan Fungsi UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat**

dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Sanggar-Sanggar Seni di Kota Pontianak”.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Pelaksanaan Pembinaan Sanggar-Sanggar Kesenian di Kota Pontianak yang telah diatur dalam Standard Operasional Prosedur (SOP) mempunyai beberapa permasalahan sesuai latar belakang yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perencanaan yang dilakukan UPT Museum belum memberikan program-program dan sarana terhadap aktivitas Sanggar-Sanggar Kesenian
2. Pembinaan yang dilakukan UPT Museum tidak maksimal kepada Sanggar-Sanggar Kesenian.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada: Tugas Pokok dan Fungsi UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Sanggar-Sanggar Seni di Kota Pontianak

1.4 Rumusan permasalahan

Rumusan masalah disajikan dengan maksud memperjelas sasaran penelitian. Bertitik tolak dari keseluruhan uraian latar belakang dan fokus masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu: “Bagaimana Tugas Pokok dan Fungsi UPT

Museum Provinsi Kalimantan Barat dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Sanggar-Sanggar Seni di Kota Pontianak?”

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah maka penelitian menentukan tiga variabel yaitu:

1. Untuk mengkaji Tugas Pokok dan Fungsi UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Sanggar-Sanggar Seni di Kota Pontianak ditinjau dari aspek perencanaan program dan penyediaan sarana.
2. Untuk mengkaji Tugas UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Sanggar-Sanggar Seni di Kota Pontianak ditinjau dari aspek manajemen pengelolaan sanggar.

1.6 Manfaat Penelitian

Ada dua macam manfaat penelitian yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu administrasi publik.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi (sumbangan) pemikiran yang dapat dijadikan bahan

pertimbangan bagi pemerintahan UPT Museum dalam pembinaan terhadap Sanggar-Sanggar Kesenian di lapangan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan diskusi bagi seniman, budayawan dan sanggar-sanggar seni demi perkembangan kesenian di Kota Pontianak.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa dan pihak-pihak lain yang membutuhkan untuk melanjutkan penelitian pada bidang dan kajian yang sama.